



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2021**

**KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Penggambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1 |
| Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 3 |
| BAB II CAPAIAN KINERJA | 4 |
| 2.1 Capaian Kinerja Satpol PP dan Damkar..... | 4 |
| 2.1.1 Indikator kinerja Kunci Keluaran..... | 4 |
| 2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil | 8 |
| 2.2. Akuntabilitas..... | 10 |
| BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... | 11 |
| BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL | 12 |
| 4.1.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah..... | 12 |
| 4.1.2 Realisasi..... | 12 |
| 4.1.3 Alokasi Anggaran..... | 13 |
| 4.1.4 Dukungan Personil..... | 15 |
| 4.1.5 Permasalahan dan Solusi..... | 16 |
| BAB V PENUTUP | 17 |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia- Nya sehingga Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LPPD - SKPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan LPPD SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini didasari Surat dari Bupati Tanah Laut, tanggal 11 Januari 2021, Nomor : 130 / 64 / Pem/2021, perihal Permintaan Dokumen LPPD dan lampiran Data pendukung IKK LPPD serta laporan Penerapan SPM Tahun 2021, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021.

LPPD SKPD merupakan Laporan Akhir Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021. Laporan ini juga sebagai salah satu bahan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai dasar peningkatan kinerja SKPD.

Akhirnya semoga LPPD SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan diharapkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan dalam penyusunan dan peningkatan kinerja yang akan datang. Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan LPPD SKPD ini.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi SKPD dalam mempertanggungjawabkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, memiliki Struktur yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dibantu seorang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

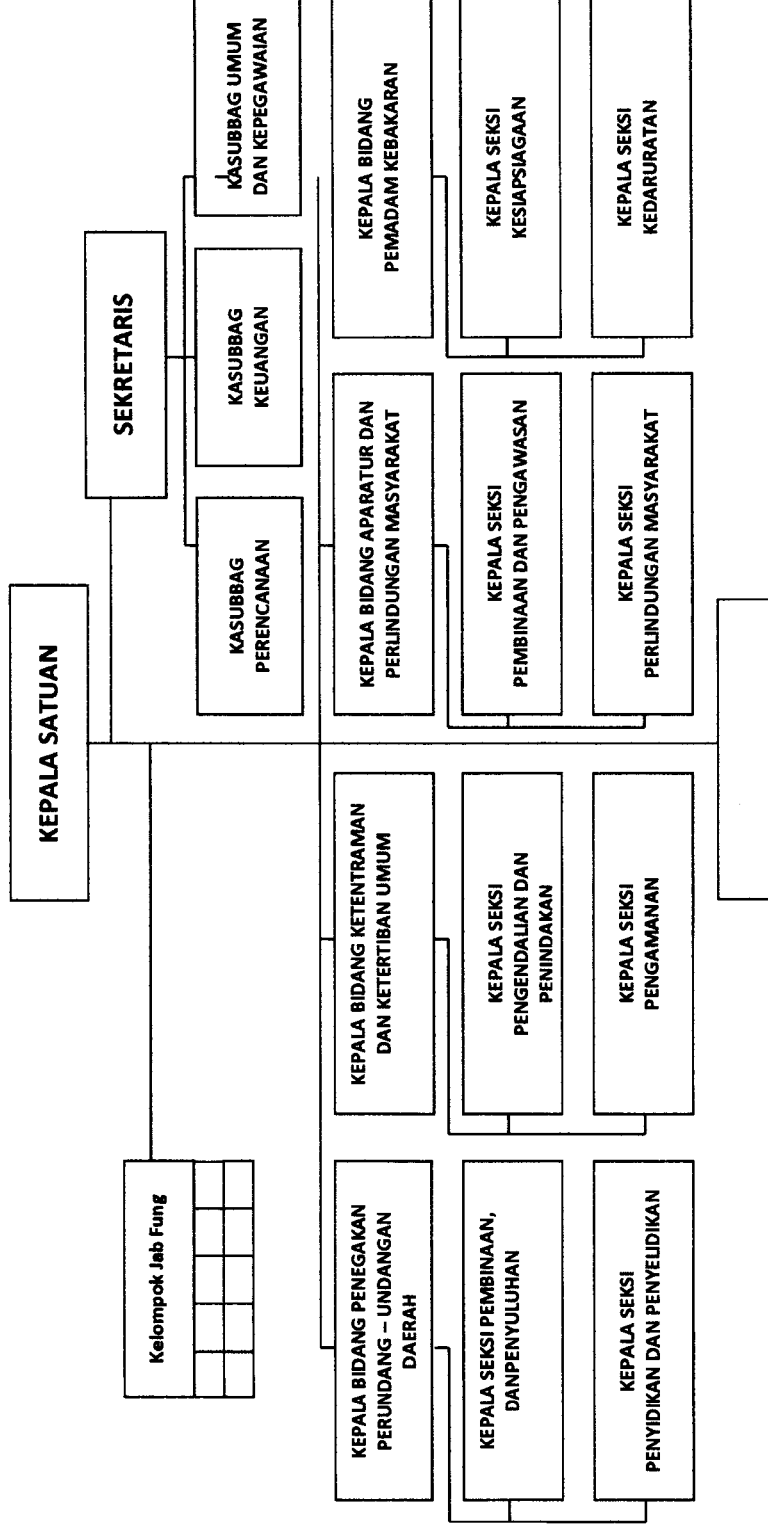
2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
4. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Dan Penindakan
 2. Seksi Pengamanan
5. Bidang Aparatur Dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Kesiapsiagaan
 2. Seksi Kedaruratan

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2021



BAB II CAPAIAN KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan gambaran dari keberhasilan dalam mengatur dan mengurus urusan SKPD yang menjadi kewenangan SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan. Laporan capaian kinerja urusan SKPD memuat data/informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara lengkap.

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci Hasil | No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|----|--|----|---|----|---|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 1 | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang Ditangani | 68 Pelanggaran | Satpol PP dan Damkar | |
| | | | | 2 | Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | 490 Terlatih | Satpol PP dan Damkar | |
| | | | | 3 | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan | 26 | Satpol PP dan Damkar | |
| | | | | 4 | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS | 2 orang | Satpol PP dan Damkar | |
| | | | | 5 | Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum | Tersedia | Satpol PP dan Damkar | |
| | | | | 6 | Tersedianya sarana prasarana minimal | Tersedia | Satpol PP dan Damkar | |
| | | 2 | Jumlah warga | 1 | Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai | 1/1 x 100% = | Satpol PP | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------------|--|
| | | | dengan dinyatakan sah/legal | 100% | dan Damkar | |
| | negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 2 | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 110/9.913 x 100% = 1,11 % | BPBD | |
| 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 1 | Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal | 1/1 x 100% = 100% | Satpol PP dan Damkar | |
| | | 2 | Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal | 1/1 x 100% = 100% | Satpol PP dan Damkar | |
| | | 3 | Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan | Nihil | Satpol PP dan Damkar | |
| | | 4 | Persentase warga negara yang ikut Pelatihan | Nihil | Satpol PP dan Damkar | |
| | | 5 | Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | Nihil | Satpol PP dan Damkar | |
| | | 6 | Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan | Nihil | Satpol PP dan Damkar | |
| 4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 1 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB | 100 % | | |
| | | 2 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana | 100% | | |
| | | 3 | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | 100% | | |
| | | 4 | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana | 100% | | |
| 5 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi | 1 | Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di | 1. 80 Evaluasi dan Penyematan korban terjebak pada objek | | |

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

| No | Urusan Pemerintahan | No | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---------------------|--|----|---|---|-------------|-------------------------|
| Urusan Wajib | | | | | | |
| 1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang ditangani = 49 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 49 | 100% | Satpol PP & Damkar |
| | | 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan = 55 ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 55 | 100% | Satpol PP & Damkar |
| | | 3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 110 orang | Satpol PP & Damkar BPBD |
| | | 4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 30 orang | Satpol PP & Damkar BPBD |
| | | 5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 119 Jiwa | Satpol PP & Damkar BPBD |

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja menginformasikan capaian keberhasilan Satpol PP dan Damkar dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala SKPD.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak ada Melaksanakan Tugas Pembantuan/ Kegiatan dimaksud”

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SKPD pelaksana SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) terdapat dua SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Tanah Laut

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas meliputi :
 - a. Pelayanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.1.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target | Keterangan |
|----|--|---|--------|---------------------|
| 1 | Pelayanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara | 100% | SatpolPP dan Damkar |

4.1.2 Realisasi

Tabel 4.2 Realisasi Pencapaian SPM di Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target | Capaian |
|----|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Pelayanan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara | 115 orang (100%) | 115 orang (100%) |

4.1.3 Alokasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam tahun 2021 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) setelah Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 19.1345.719.150 yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.993.067.072,-
 Belanja Langsung : Rp. 9.370.497.408,-

Tabel 4.3 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi % |
|-----|---|---------------|----------------|-------------|
| I | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | |
| | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 528.444.000 | 479.434.600 | 90,73 |
| | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 151.665.000 | 148.647.100 | 98,01 |
| | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 376.779.000 | 330.787.500 | 87,79 |
| II. | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9.754.320.186 | 9.255.558.186 | 94,89 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-------|
| | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 1.320.097.090 | 1.195.943.000 | 90,60 |
| | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 520.342.500 | 387.850.000 | 77,21 |
| | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 78.461.600 | 45.573.850 | 58,08 |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia | 4.779.741.696 | 4.552.514.036 | 95,25 |
| | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum | 3.073.677.300 | 3.073.677.300 | 100 |
| III. | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 454.892.080 | 341.616.700 | 75,10 |
| | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 24.545.000 | 17.595.500 | 71,69 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------|
| | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 248.668.200 | 195.290.000 | 78,53 |
| | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 181.678.880 | 128.731.200 | 70,86 |

4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut per Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 42 (empat puluh dua) orang dan Non Pegawai Negeri Sipil (PTT) 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang

Tabel 4. 4 Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

| Golongan/Kepangkatan | | | | Jlh | Pendidikan | | | | | | | Jlh |
|----------------------|----------|---------|--------|-----|------------|----|----|----|-------|------|----|-----|
| Go I IV | Go I III | Go I II | Go I I | | S2 | S1 | D3 | D2 | SLT A | SLTP | SD | |
| 6 | 13 | 21 | 2 | 42 | 2 | 14 | 3 | - | 23 | - | 2 | 42 |

Tabel 4.5 Jumlah PTT / Pendidikan Tahun 2021 Pegawai Tidak Tetap (PTT)

| Pendidikan | | | | | | Jlh |
|------------|----|----|-------|------|----|-----|
| S1 | D3 | D2 | SLT A | SLTP | SD | |
| 14 | 4 | - | 154 | 1 | - | 173 |

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Laut

- Dalam penerapan SPM pada tahun anggaran 2021, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Kurangnya sarana penunjang seperti kendaraan operasioanal dan kendaraan-kendaraan serta peralatan/perlengkapan pendukung lainnya.

Solusi :

- Peningkatan sarana dan prasarana, mengecek aset yang ada serta mendata segala kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan ketentraman dan ketertiban.

BAB V

P E N U T U P

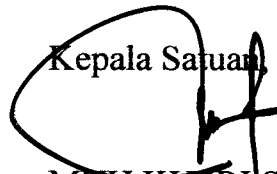
A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. LPPD SKPD ini diantaranya memuat Kebakaran, penyelenggaraan urusan serta realisasi dan tingkat capaian kinerja dari program dan kegiatan serta evaluasi kinerja yang tergambar melalui masalah-masalah yang dihadapi serta solusinya.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mewujudkannya melalui program dan kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 melalui DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memperoleh alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp. 9.248.656.329,- dan direalisasikan sebesar Rp. 8.570.675.130,- atau 92,67%, sementara sebesar Rp. 677.981.199,- atau 7,33% dari dana yang disediakan tidak direalisasikan karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Pelaihari, 26 Januari 2022

Kepala Satuan



MUH.KUSRI,SP
PEMBINA TK.I(IV/b)
NIP.196903151998031012